

KEGAMANGAN DEMOKRASI DAN GERAKAN KESETARAAN GENDER

Oleh: Sholeh UG

Ketika Balgis Ratu Negeri Saba', atau Ratu Sima, atau Tribuana Tunggadewi melangkah ke jenjang kekuasaan, tidak terdengar —setidak-tidaknya sejarah tidak pernah menulis — terjadi polemik antara boleh atau tidak perempuan-perempuan itu berkuasa. Kalau sekarang, di era modern, di mana komputer dan internet sudah menjadi 'kitab suci', manusia semakin rasional, masalah kepemimpinan perempuan justru jadi persoalan, Jadi, generasi manakah yang lebih primitif dan irrasional?.

Boleh tidak perempuan jadi presiden, merupakan pertanyaan politis yang juga selalu dijawab dari kaca mata politik. Tentu jawabannya dipengaruhi oleh kepentingan, peran dan posisi penjawab pertanyaan itu. Apalagi saat ini salah satu kandidat presiden Indonesia adalah perempuan. Anehnya, polemik itu seolah-olah berkaitan dengan Islam dan menjadi persoalan umat Islam. Dukung-mendukung baik dengan dalil aqli maupun naqli sama kuat dan hebat. Mereka yang menolak menggunakan dalil naqli, dari Al-Qur'an atau hadits nabi, sedang yang menyetujui menggunakan dalil aqli, "yang tidak boleh dijabat oleh perempuan menurut hukum Islam adalah jabatan khalifah, sedang presiden karena tidak menjadi penguasa 'mutlak' hukumnya boleh." Sambil ditambahi, Indonesia bukan negara agama (Islam).

Sudah banyak pendapat dilontarkan, didiskusikan bahkan diperdebatkan, dan tulisan ini tidak bermaksud memasuki wilayah diskursus gender secara teoritik. Walaupun bisa, tulisan ini hanya berpretensi memberi pandangan lain, itupun semoga tidak menambah keruwetan jagad politik dan kajian agama.

Dewi Tolol

Dunia masih cenderung patrimonial, lelaki dianggap serba kuasa, perempuan hanya pendamping. Perempuan diibaratkan sebagai dewi yang cantik namun tolol, dia dipuji, disembah, hanya karena kecantikan, syahwat. Sekaligus ia dihinakan karena tolol. Pandangan seperti itu, hingga kini masih dominan, bukan hanya dikekalkan oleh kaum pria sebagai pemegang dominasi, tapi juga kaum perempuan.

Banyak perempuan yang masih mengharapkan dan ingin bertahan menjadi Dewi Tolol, baik dengan alasan agama maupun adat-istiadat dan budaya. Istilah *suargo nunut, neroko katut, konco wingking, atau sigaring nyowo, garwo*, mengasosiasikan perspektif Dewi Tolol itu masih dominan. Istilah-istilah itu, jika ditelaah mendalam, tidak bermotivasi menghina atau merendahkan, tapi karena persepsi yang keliru istilah tersebut menjadi kering makna.

Dominasi laki-laki atas perempuan memperoleh bentuk dalam struktur politik, khususnya Indonesia. Contoh sederhana, perempuan selalu menjadi Ketua Dharma Wanita di instansi yang dipimpin suaminya. Sebuah jabatan yang menempatkan perempuan sebagai Dewi Tolol. Jika seorang laki-laki jadi presiden, maka si istri disebut *the first lady*, Ibu Negara. Kalau perempuan menjadi presiden, maka mungkinkah si suami disebut Bapak Negara?, dalam konteks Indonesia kalau suami dari istri yang menjabat sebagai presiden disebut Bapak Negara, lantas bagaimana posisi Soekarno dan Hatta yang juga sering disebut 'Bapak Negara'?

Pertanyaan itu mungkin terlalu naif dan mengada-ada. Memang. Sebab diskursus gender dan kepemimpinan perempuan juga mengada-ada. Para feminis, pejuang kesetaraan gender, maupun para penentangannya, sama-sama mendukung mitologi. Gerakan feminisme beranggapan ada mahluk jahat, kuat, dan siap *mencaplok* perempuan. Untuk melawan mahluk jahat bernama 'dominasi laki-laki' itu diperlukan kekuatan yang seimbang, setara. Anehnya, dalam melakukan perlawanan tersebut terkadang perlu meminta dukungan dan pengakuan 'si mahluk jahat'. Demikian pula sebaliknya, para penentang kesetaraan gender menganggap ada mahluk jahat, setan, dalam ujud perempuan. Mahluk ini bisa menggelincirkan jalan laki-laki dalam meraih 'kebahagiaan'. Agar mahluk jahat itu tidak mengganggu, mereka harus diletakkan di bawah kekuasaan yang keras dan menindas.

Jika perdebatan dan mungkin kecurigaan itu kembali mengemuka sekarang, tidak terlepas dari kecenderungan global yang --bak angin beliung— memporak-porandakan konsepsi yang telah ada. Kecenderungan global itu terus dipaksakan oleh Barat¹ untuk ditelan, terutama oleh dunia ketiga, yang mayoritas negara Islam. Filsafat dan peradaban Barat terus disuapkan, seperti seorang ibu menyuapi anaknya, suka-

¹ Kata Barat terpaksa dipakai, namun bukan untuk menjelaskan dikotomi Timur-Barat, dalam konteks kemajuan Iptek serta ekonomi, namun untuk menerjemahkan semangat 'imperialisme' modern, secara spesifik diarahkan ke Amerika Serikat. Negara ini telah memainkan peran yang luar biasa besar untuk mendiktekan kemauannya pada hampir seluruh negara, khususnya Dunia Ketiga, melalui berbagai cara, termasuk menggunakan PBB, IMF, *World Bank* dan sebagainya. Istilah Dunia Ketiga dipakai untuk menjelaskan posisi negara yang dengan terpaksa, karena ketergantungan yang besar pada Amerika dan sekutunya, harus tunduk dan menerima 'pelajaran' apapun bentuknya, termasuk pembantaian, menanggung kelaparan, disintegrasi dan sebagainya (seperti yang dialami Indonesia).

tidak suka harus ditelan. Demokrasi, liberalisme ekonomi, maupun feminisme merupakan paham yang harus ditelan oleh semua umat manusia.

Hercules dan Filsafat Humanisme

Bila ditelusuri, gerakan feminisme merupakan episode kedua dan kelanjutan dari gerakan humanisme, yang mungkin akan dilanjutkan dengan gerakan *human pantheisme*². Karena kemajuan ilmu dan teknologi, manusia sudah sampai pada fase mampu melakukan rekayasa genetika, cloning, mampu ke ruang angkasa, mampu melakukan hubungan jarak jauh dengan satu tombol dan berbagai macam kemajuan lain. Di sisi lain, kaum agamawan yang sering dianggap representasi agama, cenderung kurang inovatif. Kondisi itu bisa memunculkan suatu gagasan, manusia tidak memerlukan Tuhan, karena sudah menjadi tuhan itu sendiri. Suatu saat manusia akan menuntut dan melakukan gerakan kesetaraan Tuhan, manusia adalah tuhan. Seperti dikatakan oleh Nietzsche "*Tuhan hanyalah gagasan manusia yang tidak berani mengikuti dorongan daya hidupnya sendiri. Tuhan mati: sekarang kami mau agar hiduplah manusia super*"³

Humanisme dibangun atas asas yang sama yang dimiliki oleh mitologi Yunani Kuno yang memandang bahwa, antara langit dan bumi, alam dewa-dewa dan alam manusia terdapat pertentangan dan pertarungan, sampai-sampai muncul kebencian dan kedengkian antara keduanya⁴

Dewa-dewa di langit terlalu sering memikirkan diri sendiri, membuat kerusakan di muka bumi, membuat banjir, badai, gempa bumi, menghasut agar terjadi peperangan, menghancurkan pertanian dan hasil panen. Manusia merasa tidak memiliki kekuasaan dan harapan untuk mengatur dirinya, dalam setiap hal mereka tergantung pada dewa. Agar dewa-dewa tidak marah, disediakan sesaji. Karena begitu menyedihkan nasib manusia, dalam mitologi Yunani disebutkan ada seorang dewa bernama Bramateus, yang prihatin akan nasib manusia. Ia mencuri 'api kehidupan' milik para dewa dan dihadiahkan pada manusia. Bramateus akhirnya dihukum oleh Zeus.

Contoh usaha manusia untuk lepas dari kezaliman para dewa digambarkan dalam serial televisi swasta, yang diputar tiap hari Minggu. Hercules, pribadi setengah manusia, setengah dewa. Hercules merupakan simbol gerakan humanisme, karena manusia yang selama ini tunduk, patuh dan selalu menjadi korban dari 'keisengan' para dewa, memperoleh semangat perlawanan. Seperti digambarkan anak zeus itu selalu menentang perilaku dewa jahat, Hera, yang ingin menggantikan posisi

² Istilah tersebut bukan istilah baku, hanya untuk mempermudah pendefinisian

³ Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika, Penerbit Kanisius, 1997, hal 197-198. Oleh penulis Allah diubah menjadi Tuhan (agar lebih netral).

⁴ Ali Syariati, Humanisme, Antara Islam dan Mazhab Barat, Pustaka Hidayah, 1992, hal40

suaminya, Zeus sebagai dewa tertinggi. Ambisi Hera dan dewa-dewa lain diwujudkan dengan munculnya huru-hara, kebakaran, mahluk jahat, gempa bumi dan berbagai bentuk keonaran lain. Dari semua kerusakan dan keonaran yang disebabkan oleh kehendak dewa itu, manusia selalu menjadi korban. Mereka diharuskan menyediakan sesaji, termasuk dalam bentuk manusia, untuk meredakan amarah dewa. Peran dan posisi manusia di dunia hanya sebagai budak dari para dewa, manusia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bahkan menggantung harapan, semua tergantung dewa. Dalam posisi ketidakadilan itu, Hercules muncul untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia. Dewa diminta untuk mengurus diri sendiri, tidak perlu turut campur dalam persoalan manusia.

Mitologi dan dominasi agama dalam kekuasaan politik bukan hanya khas Yunani, Mesir memiliki sejarah yang sama. Semula mereka mengakui kekuasaan Tuhan, kemudian kekuasaan itu diwakilkan, wakil Tuhan itu kemudian menjadi raja, Firaun, Pharaoh. Indonesia juga memiliki mitologi yang sama, seperti dikenal istilah '*Dewa-Raja*', raja memerintah berdasar hak yang diberikan oleh Tuhan, Dewa. Membantah raja sama artinya menentang Tuhan, kafir. Ambisi kekuasaan dibungkus oleh mitos yang disebut sebagai 'ajaran agama'. Dalam kehidupan Indonesia modern pun semangat Dewa-Raja masih terpelihara. Demikian juga Eropa sebelum abad 14, ketika kekuasaan negara di bawah kendali gereja

Semangat humanisme primitif itulah yang kemudian melahirkan gerakan humanisme pada abad ke 15-16. Pada abad tersebut, humanisme menjadi filsafat dominan yang cenderung bersikap skeptis terhadap ilmu pengetahuan dan tidak peduli pada agama, mendudukan manusia pada posisi sentral, dan memandang peranan serta nilai manusiawi sebagai yang paling agung di alam semesta⁵.

Munculnya filsafat humanisme tidak terlepas dari konfigurasi politik dan struktur hukum yang berlaku sebelumnya, yang memiliki kemiripan dengan mitologi Yunani, di mana peranan dewa atau langit harus diambil-alih oleh manusia. Dominasi kekuasaan agama (gereja) dalam kehidupan politik, melahirkan pandangan, bahwa manusia merupakan bagian dari dunia Kristen yang universal. Manusia hanya mengambil peran dalam kehidupan rohani, persiapan menuju mati, akhirat. Nilai-nilai teologis seperti itu mempengaruhi pandangan negara dan hukum yang berkembang ketika itu.

Akibat kekuasaan politik dilekati dogma-dogma agama, manusia menjadi tak berdaya di hadapan kekuasaan, lahir aliran filsafat humanisme yang meletakkan peran dan posisi manusia sebagai pribadi yang bebas. Pada abad ke 15 mulai muncul pengharapan akan kehidupan dunia yang lebih bebas, bergembira, tanpa tekanan, lahir semangat *Renaissance*. Manusia mulai menentang penindasan, perbudakan,

⁵ Amien Rais, Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta, 1986, hal xiii.

dan ketidak-adilan. Eksploitasi manusia oleh manusia lain, satu bangsa oleh bangsa lain harus dihapuskan. Humanisme yang meletakkan nilai-nilai kodrati manusia pada dataran yang tinggi, memberi penghargaan dan perlindungan terhadap kebebasan. Kreativitas manusia dihargai dan didorong terus-menerus.

Munculnya revolusi industri, yang merupakan 'hikmah' dari penghargaan kebebasan asasi, melahirkan standar penilaian manusia berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kapital yang dimiliki. Penguasaan manusia terhadap kapital dan sumber-sumber alam, menjadi tolok ukur status sosial seseorang. Manusia dihargai berdasar proses kerja, mekanistik, dengan mengejar kemakmuran setinggi-tingginya. Berikutnya terjadi pergeseran tata nilai, akibat tenaga manusia digantikan oleh mesin, hubungan antar individu, penghormatan dan ketertundukkan pada pranata sosial mulai longgar. Pergeseran bukan hanya terjadi di bidang ekonomi-industri, melainkan juga di bidang politik, karena terjadi peminggiran (marginalisasi) terhadap manusia yang lemah secara ekonomis. Kehidupan politik menjadi wilayah pemilik modal, yang membentuk sistem politik feodalistik-kapitalistik. Sebelum revolusi industri, kekuasaan terpusat pada raja dan keluarganya. Setelah revolusi industri, kaum pemilik modal yang juga bangsawan menuntut hak politik untuk ikut mengatur negara, tuntutan itu memunculkan *House of Lord*, di Inggris. Pemilik modal yang semula memainkan peran di sektor perekonomian, kemudian menuntut hak politik untuk ikut menentukan arah perjalanan negara.

Dalam situasi dominasi kapital, lahir tuntutan untuk memberi peluang dan penghargaan yang sama pada manusia. Kekuasaan harus dibagi secara merata, bukan hanya pada pemilik modal. Negara harus memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan peluang usaha, tiap warga negara memiliki kewenangan untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam penentuan kebijakan publik. Kekuasaan yang semula tunggal, dibagi menjadi wilayah eksekutif, yudikatif dan legeslatif.

Ketika pengakuan harkat dan martabat manusia sudah mulai membaik, didukung oleh perkembangan nilai-nilai sosial muncul semangat baru. Semangat baru itu diilhami oleh terjadinya ketidak-adilan dalam pengelolaan kehidupan, karena masih didominasi laki-laki. Dominasi laki-laki selalu dijustifikasi dengan semangat yang katanya "ajaran agama", tata nilai budaya, dan klaim-klaim lain. Kaum lelaki sering menganggap memiliki kekuasaan 'illahiah', karena perintah agama, harus mengatur perempuan. Pengembangan semangat doktriner itu melahirkan kembali perlawanan, berupa tuntutan kesetaraan. Lelaki adalah langit, perempuan adalah bumi, maka kekuasaan langit harus diturunkan atau setidaknya berbagi peran dengan bumi. Kesetaraan bukan saja urusan dewa dan manusia, tapi juga antarmanusia. Dominasi laki-laki harus dihapuskan, harus ada kesederajatan dengan perempuan. Lahirlah gerakan feminisme.

Feminisme sudah sejak beberapa dekade terakhir menjadi gerakan global, pengalaman di beberapa negara, gerakan itu telah meluluh-lantakkan pendekatan

teologis yang diyakini masyarakat. India, misalnya, dengan tradisi agama Hindu yang kuat, telah mengubah nilai-nilai yang selama ini diyakini terhadap perempuan dan meletakkan perempuan sebagai perdana menteri, seperti Indira Gandhi. Demikian juga Pakistan dengan tradisi agama Islam yang kuat telah menempatkan Benazir Bhuto sebagai perdana menteri.

Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup

Dari semua gerakan di atas, baik humanisme maupun feminisme merupakan antitesa dari dominasi kekuasaan, seperti demokrasi merupakan antitesa dari absolutisme. Hal tersebut dapat dipahami : antara kekuasaan, perlawanan dan agama selalu memiliki kepentingan untuk mengaktualisasikan diri, sesuai semangat zamannya (*zeitgeist*). Konflik kepentingan untuk mendominasi berhadapan dengan gerakan pembebasan. Ketika agama dipahami secara dangkal dan dijadikan alat justifikasi kekuasaan, hingga menjadi jumud, rakus dan menindas, muncul gerakan pembebasan diri, melalui filsafat. Juga sebaliknya ketika kekuasaan begitu hegemonik, agama sering menjadi ilham lahirnya gerakan perlawanan, seperti di Amerika pernah muncul gerakan *social gospel*, yang ingin menerapkan ajaran kristiani dalam kehidupan sosial. Di Iran semangat Syiah telah melahirkan revolusi Islam, atau sebelumnya Hasan Al Banna di Mesir, Hasan Turabi di Sudan, Mustofa Siba'i di Syria. Atau yang terakhir, peran Kardinal Jaime Sin di Philipina yang ikut andil dalam meruntuhkan kekuasaan Marcos, juga Uskup Desmond Tutu di Afrika Selatan. Mereka merupakan contoh peran agama melalui agamawan. Konflik kepentingan antara tiga faktor yang kerap menimbulkan pertentangan, secara keseluruhan tidak selalu berdampak negatif berupa saling meniadakan (*zero sum game*). Karena tidak selalu mempertentangkan antara iman dan akal. Justeru melakukan rasionalisasi ajaran agama untuk menyikapi kehidupan, atau sering diistilahkan 'membumikan ajaran agama', seperti munculnya Teologi Pembebasan di Amerika Latin.. Sekaligus hal itu mengajarkan pada kita, semangat pembaharuan agama merupakan siklus-spiral, yang akan muncul ketika ajaran agama telah dimanipulir hingga jumud.

Tiap gerakan perlawanan, apapun bentuknya, termasuk humanisme, demokrasi atau feminisme, semula melahirkan semangat untuk memperbaharui, dan mengilhami lahirnya semangat penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, menuju tatanan kehidupan yang lebih beradab.

Demokrasi menolak kekuasaan tunggal, absolut, dan menjadikan kekuasaan (*power*) bukan sebagai *mandate of heaven* yang tak boleh diganggu-gugat, diganti dengan sistem kekuasaan yang dapat dan harus dibagi. Kekuasaan merupakan sesuatu yang alamiah, bukan hal sakral, sehingga tidak boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu dengan klaim tertentu pula. Demikian juga humanisme dan feminisme telah meletakkan posisi manusia pada kepribadian dan potensi yang dimiliki, bukan diatur dan ditentukan dari 'atas'.

Namun tidak berarti paham-paham tersebut tanpa kritik. Demokrasi, yang disebut sebagai sistem yang terbaik⁶ namun belum menemukan bentuk yang sesuai dan disepakati oleh tiap negara dan bangsa. Karena belum disepakati secara universal, demokrasi hanya menjadi 'label' untuk menjaga hubungan antarnegara, sebab kenyataannya banyak negara di dunia dengan model kekuasaan otoriter tapi dibungkus oleh istilah demokrasi terpimpin, atau demokrasi rakyat dan sebagainya. Dengan demikian demokrasi sesungguhnya hanya berdasarkan asumsi.

Demokrasi sebagai pandangan hidup yang meletakkan setiap manusia dalam posisi kesederajatan, ternyata hanya berlaku untuk kaum laki-laki dan hanya dalam wilayah kerja politik, belum menyentuh wilayah sosial, ekonomi dan budaya. Lahinya feminisme merupakan bukti kongkret dari kegagalan demokrasi

Pada dasarnya demokrasi mengajarkan suatu bentuk perlawanan dari kekuasaan yang luas, dengan memberikan pada individu hak-haknya, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan, hak persamaan termasuk persamaan gender, hak untuk bebas dari rasa takut, kebebasan memilih, berserikat, termasuk hak untuk menentang negara. Dari semua hak kebebasan itu yang terpenting adalah hak untuk bebas dari rasa takut.

Rasa takut selalu muncul jika ada dominasi, baik ekonomi, politik maupun gender. Perbedaan kelas, suku, agama, saluran politik dan gender sering memunculkan konflik, jika salah satu pihak mendominasi pihak lain. Dalam kondisi tersebut ada dua kepentingan yang terlibat dan berseberangan, pemegang kekuasaan selalu ingin mempertahankan dominasinya, berhadapan dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan, yang selalu ingin melahirkan kesederajatan. Dominasi selalu melahirkan eksploitasi, dominasi politik melahirkan kekuasaan yang hegemonik dan otoriter. Dominasi ekonomi melahirkan akumulasi kapital di satu sisi dan penghisapan di sisi lain. Dominasi gender melahirkan tatanan yang menyimpang. Namun keberhasilan gerakan perlawanan sering diikuti dengan ketidak-konsistenan, karena seperti dalam dialektika Hegel, kelas-kelas lama digantikan kelas-kelas baru. Penguasa yang sekarang mendominasi harus digantikan oleh kekuatan perlawanan. Beberapa episode sejarah membuktikan, gerakan perlawanan terhadap kekuasaan, akan memunculkan dominasi kekuasaan baru

Kritik Carol C Gould⁷ tentang kebebasan negatif dan positif, menunjukkan, kebebasan yang selama ini diperjuangkan hanya membebaskan manusia dari rasa takut. Belum mengarah pada kebebasan positif, berupa penyediaan fasilitas yang

⁶ PBB melalui Unesco pada tahun 1950 melakukan penelitian yang melibatkan pakar dari negara Barat dan Timur, dan obyek penelitiannya juga di negara-negara Barat dan Timur. Dari hasil penelitian itu, diketahui tidak ada yang menolak demokrasi. Dan demokrasi dianggap sebagai sistem yang terbaik

⁷ Lihat Carol C Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993,

dibutuhkan untuk pengembangan potensi diri termasuk bagi perempuan. Partisipasi juga masih dalam kerangka politik, seperti Pemilu, referendum maupun jajak pendapat.

Persamaan asasi semua manusia merupakan pengakuan bahwa dalam hal yang mendasar semua orang sama dan sederajat, tanpa diskriminasi berdasar agama, kelas sosial, suku, maupun gender. Hak yang melekat pada diri manusia bukan merupakan pemberian dari negara, tapi merupakan peluang atau tantangan yang harus diperjuangkan. Persamaan atau hak asasi merupakan kebahagiaan manusia, individu memiliki hak untuk mencari atau memperjuangkan kebahagiaan itu tanpa dihalangi oleh rintangan-rintangan yang tidak masuk akal⁸. Termasuk yang tidak masuk akal adalah perbedaan gender. Namun demokrasi dengan persamaan asasi itu masih dipahami secara politis, bukan dalam seluruh aspek kehidupan, karena pendekatan (politik) itu sangat dipengaruhi oleh pandangan kaum strukturalis.

Kaum strukturalis beranggapan politik memiliki struktur, masing-masing bagan struktur menjalankan fungsi-fungsi. Dari fungsi itu muncul kontradiksi dan keseimbangan. Metode kontradiksi diintrodusir oleh Marx, sedang metode keseimbangan diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Strukturalis Marx dengan metode dialektikanya menilai sistem hubungan produksi mempengaruhi kesadaran kelas. Kesadaran akan kelas itulah yang akan atau bisa menimbulkan konflik⁹. Kaum strukturalis ini menghendaki terjadi transformasi sistem, maupun transformasi sebagai evolusi dari bawah ke atas¹⁰. Atas-bawah merupakan konflik antar pemegang dominasi dengan 'korban' dominasi.

Pendekatan seperti itulah yang berpengaruh terhadap munculnya ide kesetaraan gender. Asumsi yang dipakai adalah tiap bagian memiliki dan menjalankan fungsi masing-masing secara sederajat, tidak boleh ada rintangan hanya karena pelaku fungsi itu perempuan. Perempuan menganggap dalam mengaktualisasikan potensi, belum diberi kesempatan untuk menjalankan fungsinya dalam masyarakat, kondisi itu memunculkan kesadaran untuk melakukan perlawanan atas dominasi laki-laki. Karena kebebasan merupakan peluang dan tantangan yang harus diperjuangkan.

Jika demokrasi diterapkan lebih bijak, kesederajatan bukan hanya dipandang struktural, maka gerakan feminisme tidak akan muncul. Kebebasan dalam arti kegiatan pengembangan diri bukan hanya membutuhkan kebebasan dari gangguan dari luar, melainkan juga tersedianya kondisi-kondisi sosial dan material yang diperlukan bagi pencapaian tujuan atau rencana seseorang¹¹. Kebebasan dalam arti tersebut, telah menarik makna kebebasan dari wacana politik ke wacana sosial, ekonomi dan budaya. Tersedianya kondisi-kondisi sosial dan material yang diperlukan,

⁸ Lihat Wiliam Ebenstein dan Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal 194.

⁹ David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal 373.

¹⁰ *Ibid* hal 374

¹¹ C. Gould *Op.cit* hal 32

seperti lapangan kerja, sumber-sumber modal, sarana pendidikan, kesempatan yang sama untuk menjalankan peran sosial dan politik dan sebagainya.

Contoh menarik dari gagalnya pelaksanaan semangat egaliter dan kesetaraan terlihat di Amerika yang sering disebut kampiun demokrasi, setelah sekian tahun mempraktekkan demokrasi, baru pada penghujung abad duapuluh ini ada seorang Menteri Luar Negeri perempuan (Madelin Allbright), dan belum ada presiden perempuan. Para pekerja perempuan Amerika, dengan waktu kerja yang sama dengan laki-laki, hanya menerima 60% dari lawan jenisnya¹². Melihat data itu, orang Aceh harusnya bisa menjadi guru dunia, karena dari bumi Aceh lahir panglima perang yang begitu perkasa, kharismatis dan ditakuti: Cut Nyak Dien. Perempuan. Toh orang Aceh tidak pernah mengintrodusir paham kesetaraan gender.

Kritik kedua dari demokrasi adalah pengagungan mitos rasionalitas hingga manusia menjadi korban mitos yang dikembangkan sendiri. Salah satu ciri demokrasi sebagai pandangan hidup adalah semangat rasionalitas. Empirisme rasional sebagai unsur terpenting yang didasarkan pada kepercayaan terhadap akal budi atau nalar, dan kemungkinan penerapan akal bukan hanya pada alam fisik, tapi juga pada hubungan antarmanusia. Konsekwensi dari empirisme rasional adalah diyakini kebenaran probabilitas, suatu kebenaran yang relatif dan mungkin terus berubah¹³. Kebenaran sosial selalu relatif, terbuka peluang untuk diperdebatkan dan dilakukan perubahan. Namun pendewaan rasionalitas, telah melahirkan mitos baru, berupa kemodernan. Seperti disinggung di awal tulisan ini, isu gender baru mencuat beberapa waktu terakhir, tidak pada masa Ratu Belgis atau Ratu Sima, misalnya.

Kemodernan diasumsikan sebagai keharusan manusia untuk selalu berpikir rasional, anti misticis, semua yang bisa dinalar, rasional berarti ilmiah dan modern, sedang yang tidak rasional, tidak ilmiah berarti tidak modern. Namun, seperti banyak diakui ahli antropologi Barat, bahwa manusia adalah mahluk misterius. Untuk memecahkan misteri manusia, seringkali diperlukan kajian maupun pendekatan yang irrasional, seperti semangat ketuhanan. Pilihan-pilihan rasional yang selalu dikembangkan untuk mengukur kadar demokrasi, kerap tidak mampu memberi 'kepuasan'. Kasus pendeta Jim Jones yang mengajak bunuh diri jemaahnya di sebuah hutan di AS, atau penangkapan pengikut sekte Aum Rikyu di Jepang merupakan bukti kongkret ketidak-konsistenan itu. Negara telah mengambil alih 'hak' Tuhan, dengan menyatakan suatu sekte keagamaan sebagai ajaran sesat. Tentu saja apa yang dilakukan negara itu irrasional.

¹² Bandingkan dengan Jerman (70%), Italia (74%), Perancis (86%) (William Ebenstein, Op.Cit hal 204).

¹³ Ebenstein, Ibid hal 186-188

Wanita Tiang Agama

Munculnya tuntutan kesetaraan gender dalam segala hal, termasuk masalah kepemimpinan perempuan, seperti sudah disinggung di atas, merupakan kegagalan konsep demokrasi. Sekaligus menjelaskan dominasi kultur masyarakat, bukan hanya di negara berkembang, tapi juga di Barat, bahwa perempuan masih diletakkan di bawah pengampuan laki-laki. Jika di Indonesia saat ini masalah kepemimpinan perempuan diributkan, bahkan menyeret 'agama' untuk ikut bertempur, merupakan sebuah 'kekonyolan pemikiran'. Persoalan kepemimpinan perempuan sesungguhnya hanya masalah ambisi politik-kekuasaan, dan sebaiknya agama tidak dijadikan senjata, baik untuk menentang maupun mendukung. Ajaran agama terlalu suci untuk dimanipulasi bagi ambisi-ambisi politik.

Melihat dua hal itu, maka masalah kepemimpinan perempuan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor.

Pertama, sosio-religius. Sejauh mana pemahaman agama mayoritas masyarakat akan menentukan peran sosial perempuan, protes perempuan Saudi Arabia yang tidak diperbolehkan mengendarai mobil, dapat menjadi contoh. Semakin terbuka pemahaman agama masyarakat, semakin besar peluang perempuan berpartisipasi, termasuk untuk memimpin, seperti terjadi di Pakistan, India, Banglades dan Philipina serta Turki. Pemahaman keagamaan juga terpengaruh oleh sejauh mana masyarakat toleran terhadap ide-ide baru. Semakin tertutup masyarakat dalam menerima ide-ide baru, semakin tradisional pemahaman mereka terhadap agama, dan sebaliknya. Terbukanya masyarakat dalam menerima ide baru tidak selalu berarti baik, misalkan diperbolehkannya wanita mengendarai mobil sendiri lebih baik daripada dengan supir yang bukan muhrim. Tapi diterimanya gagasan aborsi, dan *euthanasia* adalah hal naif dan buruk.

Kedua, sosio-politik. Masyarakat yang kaku, tertutup dan kekuasaan yang ada di masyarakat tersebut cenderung bersikap otoriter, maka sulit mengharapakan peran sosial yang lebih besar dari perempuan terwujud. Karena masyarakat dengan corak seperti itu akan terus mempertahankan dominasi, baik ekonomi, politik maupun gender. Dalam masyarakat seperti itu masih terjadi pengagungan status, termasuk status lelaki sebagai kepala rumah tangga.

Ketiga, tingkat pendidikan. Semakin maju tingkat pendidikan masyarakat, makin mudah menerima ide-ide baru, dan tidak jumud dalam memegang suatu prinsip, baik yang berdasar agama maupun tradisi. Maka semakin besar peluang perubahan termasuk masalah kepemimpinan perempuan. Pada masyarakat tradisional misalnya, perempuan hanya memiliki peran untuk *masak, macak dan manak, atau pupur, kasur dan dapur*. Namun dalam masyarakat yang lebih terbuka peran perempuan telah berubah menjadi setara dengan laki-laki dalam meraih peluang dan kesempatan..

Ketiga faktor itu perlu disampaikan, karena dalam masyarakat masih terjadi perbedaan atau kurang-tepatan artikulasi ajaran agama, khususnya Islam, termasuk dalam membahas masalah perempuan. Islam, mendefinisikan peran sosial perempuan sebagai tiang negara. Islam telah memberi peran dan fungsi perempuan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh laki-laki. Doktrin Islam yang sangat populer, berdasar hadits nabi, "Wanita adalah tiang negara, kalau tiangnya bagus dan baik, maka baiklah negara itu, dan sebaliknya. Artinya perempuan diletakkan dalam posisi sangat strategis, sebagai *moral guard*, penjaga moral. Peran tersebut harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perempuan, karena saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral, maka perempuan dapat tampil untuk memperbaiki moral bangsa.

Peran *moral guard* menjadi prioritas utama yang harus dilakukan perempuan. Melalui peran itu masalah pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, pelacuran dan aborsi menjadi persoalan penting yang harus dicari jalan keluarnya. Namun sangat disayangkan gerakan kesetaraan gender juga terjebak pada persoalan struktural-politis, belum pada wilayah yang lebih strategis bagi pemberdayaan perempuan secara keseluruhan. Masalah poligami, sebagai contoh, yang mampu mengangkat harkat dan martabat perempuan, ditentang oleh pendukung kesetaraan gender. Padahal dalam masyarakat kita, perempuan masih dianggap *ora ilok* jika menjadi perawan tua, dan sering menjadi gunjingan jika menyandang status sebagai janda. Artinya peran sosial mereka akan menemui jaring-jaring hambatan kultural dan poligami menjadi alternatif untuk memperjuangkan peran sosial perempuan yang terhambat jaring itu.

Persoalan berikutnya dari peran sebagai penjaga moral adalah, apakah untuk menjalankan fungsi penjaga moral itu diperlukan kekuasaan?. Seperti kaidah usul fiqh, jika untuk melakukan sesuatu diperlukan sesuatu, maka sesuatu (yang kedua) itu wajib hukumnya. Artinya apakah untuk menjalankan fungsi sebagai penjaga moral itu diperlukan kekuasaan politik (presiden)?. Jika memang diperlukan maka posisi presiden perempuan menjadi wajib hukumnya.

Untuk melihat kadar kualitas keperluan itu, bisa diperbandingkan dengan posisi laki-laki. Apakah laki-laki sudah tidak bisa dipercaya karena tidak memiliki integritas moral dan intelektual untuk memimpin?, atau laki-laki sudah kehilangan peran dan fungsinya sebagai laki-laki?. Juga sejauh mana peran presiden dalam mempengaruhi individu warga negara?. Karena semakin demokratis negara, semakin rendah peran kekuasaan dalam kehidupan pribadi warganya. Jika untuk menjalankan peran sebagai penjaga moral harus memegang kekuasaan, maka kekuasaan didefinisikan masih ingin ikut campur dalam kehidupan pribadi warganya, kekuasaan demikian menjadi otoriter dan hegemonik. Sebaliknya peran institusi sosial, politik dan keagamaan atau peran serta rakyat rendah. Dengan ciri-ciri itu negara menjadi tidak

demokratis. Negara yang kekuasaannya diimplementasikan dalam diri pemimpin, bagaimana mungkin moral dapat ditegakkan?.

Untuk mewujudkan pemerintahan dan sistem yang demokratis (bijak), maka anggapan kekuasaan sebagai *mandate of heaven* harus diganti dengan kekuasaan yang demokratis, egaliter dan memungkinkan terjadinya *share of power*. Peran negara dalam mempengaruhi kehidupan warganya semakin berkurang, dan peran serta rakyat lebih dominan. Dengan tesis itu, maka untuk menegakkan moral bukan peran negara (penguasa) yang lebih dominan, namun partisipasi aktif warga negara (rakyat) untuk mewujudkan tatanan moral yang lebih baik. Berarti untuk menegakkan moral tidak harus melalui kekuasaan, justru moral dapat dijadikan spirit untuk mewarnai perjalanan berbangsa dan bernegara.

Kepemimpinan Konstitusional

Tiga faktor tingkat 'kemajuan' masyarakat tersebut di atas, dalam iklim demokrasi, akan berlaku paralel dengan keputusan politik. Asumsinya, keputusan politik merupakan cerminan aspirasi rakyat. Asas paralelisitas itu terjadi jika sistem politik demokratis, terbuka, dan partisipatif. Sebaliknya, dalam sistem yang otoriter, hegemonik, sangat mungkin keputusan politik merupakan kehendak penguasa yang tidak populer di mata rakyat.

Dalam konteks kekuasaan seperti yang sedang diributkan, ada baiknya seluruh anak bangsa mentaati aturan konstitusi. Bahwa Pemilu tidak memilih presiden, MPR yang memiliki kewenangan untuk memilih presiden. Karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, maka anggota MPR secara paralel juga didominasi umat Islam. Dalam hal kepemimpinan, apakah calon presiden perempuan bisa diterima atau tidak, sangat tergantung pada tingkat pemahaman agama, kedewasaan politik dan kadar intelektual mereka. Jika mayoritas umat Islam belum bisa menerima kehadiran presiden perempuan, maka anggota MPR (kembali berdasar asas paralelisitas) juga tidak akan memilih presiden perempuan.

Apa yang mengemuka saat selain dipicu oleh kepentingan kelompok, golongan, partai, juga disebabkan oleh lemahnya fatsoen politik. Ada upaya-upaya yang tidak sehat dan tidak konstitusional untuk menggolkan kepentingannya, seperti cap jempol darah, pengerahan massa, teror, dan buka-buka borok atau skandal, seperti kasus Bank Bali, kasus Lippo dan sebagainya. Semua itu menunjukkan betapa moral politik kita rendah. Oleh sebab itu perempuan perlu tampil membenahi moral bangsa.

Sedang masalah presiden perempuan biarkan berjalan alami dan sesuai konstitusi. Dalam konstitusi memang tidak ada larangan presiden dijabat oleh perempuan. Jika ada perempuan yang memiliki kemampuan kepemimpinan seperti

Ratu Balgis, memiliki kecerdasan dan semangat seperti Hypatia¹⁴, dan kadar moral dan ketakwaan seperti Rabiah al Adawiyah, sementara laki-laknya tidak ada yang memiliki prasyarat kepemimpinan, tidak masalah jika presiden dijabat perempuan.

¹⁴. Hypathia adalah sarjana wanita di Iskandariah yang lahir pada tahun 370 Masehi. Ketika itu laki-laki menganggap perempuan hanya sebagai harta milik. Hypatia selain cerdas juga cantik, Ia menolak setiap lamaran laki-laki, karena ingin mencurahkan perhatiannya pada ilmu. Karena kecerdasannya itu Ia dituduh oleh Gereja Kristen sebagai wanita yang ingin mempertahankan paganisme. Atas perintah Cyril, Uskup Agung Iskandariah, Hypatia dibunuh, dagingnya dikelupas dari tulangnya dan dibakar, termasuk perpustakaan Iskandariah yang masyhur itu. Jika Iskandariah tidak dibakar habis, maka teori relativitas sudah lahir 2000 tahun sebelum Einstein menemukan teori itu. (lihat Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Mizan, 1992, hal xxxi-xxxii)